



Pola Komunikasi Antarpribadi dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai

Muhammad Tarmizi^{1*}, Suwardi Lubis², Iskandar Zulkarnain³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: muhammad.tarmizi@outlook.co.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-01 Keywords: <i>Interpersonal Communication Patterns; Anticorruption Culture; Customs Employee Families.</i>	<p>This research aims to analyze the pattern of interpersonal communication in building an anti-corruption culture in the family of customs employees in Medan City, analyze the form of interpersonal communication messages carried out by the family of customs employees, and analyze what are the obstacles to interpersonal communication in building an anti-corruption culture in the family of customs employees in Medan City. The theory used in this research is the theory of interpersonal communication by Joseph A. Devito. The research method used in this research is qualitative research method. The number of informants in this study were five customs employees with the criteria of married customs employees, residing in Medan City, and having received an award as <i>officer of the month</i> or <i>officer of the year</i> with anticorruptive indicators. Data collection was conducted through interviews and passive participation observation. The results showed that the pattern of interpersonal communication in building an anti-corruption culture in the family of customs employees in Medan City is by conducting an <i>equality</i> pattern of communication. The forms of interpersonal communication messages used in building an anti-corruption culture in the families of customs employees are informative and persuasive. Interpersonal communication barriers in building an anti-corruption culture in the family of customs employees are <i>semantic noise</i> or semantic barriers due to differences in perception. The couples in this study agreed that interpersonal communication in a family plays a very important role in building an anti-corruption culture.</p>

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-01 Kata kunci: <i>Pola Komunikasi Antarpribadi; Budaya Antikorupsi; Keluarga Pegawai Beacukai.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan, menganalisis bentuk pesan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh keluarga pegawai beacukai, dan menganalisis apa saja hambatan komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi antarpribadi oleh Joseph A. Devito. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima pegawai beacukai dengan kriteria yaitu pegawai beacukai yang sudah menikah, bertempat tinggal di Kota Medan, dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai <i>officer of the month</i> atau <i>officer of the year</i> dengan indikator antikoruptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi partisipasi pasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan yaitu dengan melakukan pola komunikasi kesetaraan (<i>equality pattern</i>). Bentuk pesan komunikasi antarpribadi yang digunakan dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai yaitu bentuk pesan informatif dan persuasif. Hambatan komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai yaitu <i>semantic noise</i> atau hambatan semantik karena adanya perbedaan persepsi. Pasangan suami istri dalam penelitian ini sepakat mengatakan bahwasannya komunikasi antarpribadi di dalam sebuah keluarga berperan sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi.</p>

I. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia saat ini cenderung menganggap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai hal yang umum terjadi di negara ini, dan seringkali memilih untuk tidak peduli terhadap perilaku koruptif

yang ada disekitar mereka karena perbuatan korupsi dianggap sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Istilah korupsi tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia, seakan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Pemberitaan tentang korupsi tersebut banyak didapati melalui

media cetak, elektronik, maupun media sosial (Hariyani et al., 2019: 32-33).

Pejabat tinggi pemerintah pusat yang seharusnya menjadi role model kepada seluruh bawahannya, juga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Menjelang akhir tahun 2023, KPK telah menetapkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 13,9 Miliar. Sebelum itu ditahun yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, juga telah ditetapkan Kejagung RI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 8 Triliyun. Bahkan pimpinan tertinggi KPK sekalipun, Firli Bahuri, juga ditetapkan sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pemerasan pada akhir tahun 2023 lalu (Nugroho, 2023).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan sebanyak empat poin pada tahun 2022 yaitu mendapat skor 34. Pada tahun 2023, skor juga masih sama dan tidak ada peningkatan sama sekali yang lebih baik. IPK ini adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai persepsi korupsi dalam sektor publik, yang berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), dan diterapkan di 180 negara. Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko, mengatakan bahwasannya Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, dengan skor IPK 34. Angka ini menurun empat poin dari tahun sebelumnya yaitu 38, yang menandakan bahwasannya penurunan ini merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1995. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan berpotensi merugikan perekonomian dan stabilitas keuangan negara (Ni'am & Santosa, 2023: 1-2).

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwasannya pasangan dari suami/istri memiliki peran besar dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pasangannya yang menduduki jabatan sebagai pejabat publik atau seorang aparatur sipil negara. Bahkan pasangan suami istri yang juga merupakan sebagai pejabat negara, juga berkerja sama untuk melakukan perbuatan korupsi. Salah satu contoh kasus yang baru terjadi pada tahun 2023 yaitu kasus Bupati Kapuas, Ben Brahim Bahat beserta istrinya Ary

Egahni yang juga merupakan seorang anggota Komisi III DPR RI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran pembayaran ASN serta suap hingga mencapai Rp 8,7 miliar (Syakim, 2023). Selain itu, kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh pasangan suami istri adalah Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, yang terbukti terlibat dalam kasus suap proyek Wisma Atlet pada 2012 silam. Nazaruddin dan Neneng sempat kabur ke luar negeri dan menjadi buronan Interpol. Nazaruddin berhasil ditangkap di Cartagena, Kolombia. Sedangkan Neneng dibekuk KPK di kediamannya di Pejaten, saat pulang dari pelarian di luar negeri. Kasus lainnya adalah Mantan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, yang ditahan KPK karena kasus suap terhadap 3 hakim dan panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara. Ada juga kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati, yang terlibat kasus suap 5 proyek jembatan dengan nilai proyek sebesar Rp 750 juta, serta masih banyak lagi contoh pasangan aparatur sipil negara yang terlibat atau melibatkann pasangannya dalam kasus korupsi (Saptohutomo, 2023).

Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa beberapa pejabat negara, yang mungkin dengan sengaja ataupun tanpa disadari, telah melibatkan pasangan mereka dalam perbuatan korupsi tersebut. Pasangan suami istri tersebut terjatuh dalam perilaku koruptif, yang sangat jauh sekali dari nilai-nilai moral dalam sebuah keluarga. Perbuatan tersebut diduga dipicu oleh komunikasi antarpribadi diantara mereka yang secara terus menerus mengarah pada perbuatan yang negatif.

Komunikasi antarpribadi dalam sebuah keluarga memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku pasangannya, terutama mereka yang berada dilingkungan sekitar kita. Jenis komunikasi ini berkaitan erat dengan kedekatan dan keintiman dalam berkomunikasi, dimana pesan yang disampaikan memiliki dampak secara langsung bagi pasangannya. Komunikasi antarpribadi antara suami dan istri terbukti sangat efektif dalam mengubah pendapat, sikap, dan perilaku pasangannya ke arah yang positif, terutama dalam membangun budaya antikorupsi dilingkungan keluarganya (Widiyanto, 2020: 104).

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki buku panduan yang menyatakan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia seperti Denmark, Finlandia, dan New Zealand, saat ini telah mengintegrasikan konsep keluarga dalam upaya pencegahan korupsi di negara mereka. Ketiga negara ini menempati peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 dengan skor 90, 87, dan 85 dari skala 100. Demikian pula, Transparency International juga telah mengajukan rekomendasi agar keluarga dianggap sebagai upaya dalam pencegahan korupsi secara global (KPK, 2023).

Pemerintah Indonesia saat ini juga telah mengimplementasikan program pencegahan korupsi yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dikenal sebagai "Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga". Program ini secara signifikan mengandalkan peran keluarga sebagai garda terdepan dalam membentuk nilai-nilai antikorupsi pada semua anggota keluarga, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat benar-benar menjadi bagian dari setiap individu dalam keluarga tersebut (Hidayati, 2021: 60-61).

Kota Medan merupakan kota metropolitan dan termasuk kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya (Jamna, 2023). KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan menjadi kota dengan tingkat integritas paling rendah se-Indonesia dengan indeks 61,69 (Aldi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di Kota Medan masih sangat rentan untuk melakukan korupsi. Masyarakat banyak mencari kesenangan setelah seharian menjalani aktivitas yang begitu padat dan melelahkan. Selain itu, kehidupan di kota besar juga rentan terbawa arus untuk bergaya berlebihan dan juga tertuntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hidup hedon dan kesenangan yang mereka cari di kota besar ini tidak dapat dipungkiri pasti membutuhkan uang yang cukup banyak, sehingga bagi mereka yang berkerja sebagai pejabat publik atau aparatur sipil negara di kota besar, memiliki potensi untuk melakukan perbuatan korupsi.

Penyebab korupsi dapat dijelaskan melalui berbagai pandangan dan teori yang berbeda. Salah satunya ditemukan dalam Teori GONE (Greedy, Opportunity, Needs, Exposure) oleh Jack Bologne (1993), yang mengidentifikasi empat faktor pemicu korupsi. Pertama adalah sifat kerakusan (greedy), dimana individu tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka

dapatkan. Kedua adalah adanya kesempatan (opportunity), yang muncul ketika kurangnya pengawasan atau posisi jabatan yang mendukung tindakan korupsi. Ketiga adalah kebutuhan mendesak (needs), dimana kekurangan dalam kebutuhan seseorang, mendorong kuat untuk melakukan tindakan koruptif. Terakhir, faktor pengungkapan (exposure), dimana pelaku korupsi menghadapi konsekuensi jika perbuatannya terungkap (Rahayu et al., 2021: 1865).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif karena dianggap efektif dalam merinci masalah secara menyeluruh, serta mengintegrasikan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi makna umum yang melekat pada pengalaman hidup setiap individu. Fenomenologi bertujuan untuk mengamati dan memperjelas pemahaman individu terhadap suatu fenomena, membentuk makna dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. (Haryono, 2020: 193). Subjek penelitian merujuk kepada individu atau objek yang menjadi fokus dalam upaya mendapatkan informasi yang diinginkan, seperti yang dinyatakan oleh Suharsimi Arikunto (1989), yang mengartikan subjek penelitian sebagai entitas, fenomena, atau individu di mana data relevan untuk variabel penelitian ditemukan dan diperdebatkan (Idrus, 2019: 91). Peneliti menggunakan teknik purposif dalam melakukan pemilihan informan sebagai subjek penelitian. Teknik purposif penulis gunakan dengan menetapkan kriteria-kriteria yang dianggap perlu untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan informan sebagai subjek penelitian yaitu mereka yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai beacukai yang sudah menikah dan tinggal di Kota Medan;
2. Pegawai beacukai yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai *officer of the month* atau *officer of the year* dengan indikator antikoruptif.

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg mengemukakan bahwa wawancara memiliki tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak berstruktur. (Sugiyono & Lestari, 2021: 530-531). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*), dimana peneliti menyiapkan pedoman wawancara dengan poin-poin garis besar

pertanyaan saja, yang kemudian berkembang selama proses wawancara terjadi. Pada pelaksanaannya, peneliti bertemu langsung dengan informan untuk mendapatkan pesan baik secara verbal maupun nonverbal yang kemudian dicatat dengan baik. Selain itu, peneliti menyiapkan perangkat untuk merekam kegiatan selama wawancara berlangsung agar data yang dikumpulkan lebih valid.

Beberapa hal yang peneliti tanyakan kepada informan adalah berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, bagaimana bentuk pesan komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, dan apa saja yang menjadi hambatan komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai Beacukai di Kota Medan.

2. Observasi

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi, observasi terus-terang/tersamar, dan observasi tidak berstruktur. Observasi partisipasi juga masih terbagi lagi ke dalam empat bagian yaitu partisipasi pasif, moderat, aktif, dan lengkap (Sugiyono & Lestari, 2021: 522). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe observasi partisipasi pasif, dimana peneliti hanya datang ke tempat informan, tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti (Sugiyono & Lestari, 2021: 523). Peneliti tidak terlibat langsung dalam seluruh kegiatan pasangan suami istri dalam menyampaikan pesan-pesan anti korupsi, tetapi hanya mengamati melalui pendapat, sikap, dan perilaku pasangan suami istri yang sedang berlangsung selama wawancara di lokasi penelitian.

B. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, terus menerus, hingga data telah mencapai kejenuhan (Sugiyono & Lestari, 2021: 546). Ada beberapa aktivitas dalam menganalisis data (Miles et al., 2014: 12-14) yaitu:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), peringkasan (*abstracting*), penyederhanaan (*simplifying*), dan mentransformasikan (*transforming*) dari data yang telah dikumpulkan. Proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan. Data yang disusun dan dikelompokkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman informan dalam mengatasi masalah korupsi yang ada di lingkungan kerja kantor beacukai melalui pola komunikasi antarpribadi di lingkungan keluarga, menganalisis bentuk pesan, dan faktor penghambat dalam komunikasi antarpribadi, yang semuanya bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi.

2. Penyajian Data

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data berupa teks naratif sebagai bentuk pendekatan kualitatif yang peneliti lakukan. Peneliti menyusun kembali informasi yang telah dikondensasi secara sistematis.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi data

Tahap terakhir yang peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi data. Peneliti menarik beberapa kesimpulan yang berupaya untuk dapat menjawab fokus penelitian pada bab sebelumnya, yaitu mengenai pola komunikasi antarpribadi di lingkungan keluarga, bentuk pesan komunikasi, dan faktor penghambat komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Komunikasi Antarpribadi Dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai di Kota Medan

Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih, melibatkan berbagai elemen seperti pengirim dan penerima pesan, dengan tujuan membentuk hubungan yang harmonis, mencapai tujuan bersama, dan saling memahami. Pola komunikasi yang dimaksud adalah cara pesan disampaikan dari pengirim kepada penerima dengan harapan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, atau perilaku penerima. Pola komunikasi adalah metode dalam mengirimkan pesan atau informasi

menggunakan simbol-simbol seperti lambang atau melalui interaksi langsung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan mengubah perilaku menjadi lebih positif dan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas.

Penggunaan pola komunikasi dalam keluarga terutama antara pasangan suami istri merupakan cara yang terbaik untuk memengaruhi dan memberikan dorongan motivasi baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pasangannya. Peran pasangan hidup sangat signifikan dalam mengajarkan nilai-nilai mulai dari hal-hal yang terkecil hingga yang paling besar, karena pasangan hidup atau suami/istri dapat memberikan arahan, memengaruhi perilaku individu, dan bahkan dapat membentuk pandangan pasangan hidupnya terhadap hal-hal yang dianggap positif ataupun negatif.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada seluruh informan, komunikasi antarpribadi pada keluarga pegawai beacukai sangat berperan dalam membentuk dan membangun budaya antikorupsi di Kota Medan. Zaman sekarang terutama di negara kita ini istilah korupsi sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak peduli dengan para pejabat negara yang sering melakukan korupsi karena dianggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang umum terjadi. Pembentukan sikap antikorupsi dapat dimulai dari dalam keluarga.

Pola komunikasi merupakan elemen kunci dalam pemenuhan fungsi-fungsi keluarga (Thoyyibah, Zurriyatun. 2021:4). Pola komunikasi disetiap keluarga berbeda-beda tergantung pola mana yang paling sesuai untuk setiap keluarga. Pola komunikasi keluarga menurut Devito, J.A. (2016:289) terdiri dari empat jenis yaitu *equality pattern* (pola komunikasi kesetaraan), *ballance split pattern* (pola komunikasi seimbang terpisah), *unballanced split pattern* (pola komunikasi tak seimbang terpisah), dan *monopoly pattern* (pola komunikasi monopoli).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan adalah menggunakan pola komunikasi kesetaraan (*equality pattern*). Hal tersebut dikarenakan semua informan sepakat mengatakan bahwasannya pada saat berkomunikasi

dengan pasangan hidupnya, tidak ada perbedaan diantara mereka ataupun yang mendominasi, apalagi memonopoli pada saat komunikasi diantara mereka sedang berlangsung. Informan dan pasangannya memiliki kebebasan berpendapat dan berargumen. Suami istri memiliki kesetaraan dalam mengutarakan pendapat dan juga setara dalam hal pengetahuan yang dimiliki. Komunikasi yang dilakukan berjalan secara seimbang, sama, dan merata.

Hal berikutnya menurut informan, suami istri harus berkerja sama dan saling mendukung untuk melakukan perbuatan yang baik di dalam keluarganya. Perbuatan tercela harus dijauhkan dari prinsip-prinsip sebuah keluarga. Pendekatan dengan sang pencipta, sering bersyukur, dan menjadi pribadi yang rendah hati adalah salah satu cara terbaik untuk membentuk budaya antikorupsi di dalam sebuah keluarga. Adanya saling keterbukaan, rasa kasih sayang, dan saling menjaga perasaan antara suami istri juga merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi secara efektif kepada pasangannya.

Komunikasi yang efektif dalam keluarga sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga. Komunikasi yang efektif memiliki kemampuan untuk memperbaiki hubungan antarpribadi, mengelola serta menyelesaikan konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, dan juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta pengalaman dengan individu lainnya (Cangara, 2012). Komunikasi dianggap efektif ketika pesan yang disampaikan sesuai dengan maksud pengirim dan dipahami oleh penerima sesuai dengan maksud pengirimannya (Liliweri, Alo. 2017: 245).

B. Bentuk Pesan Komunikasi Antarpribadi Dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai di Kota Medan

Komunikasi merupakan aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia karena memungkinkan individu untuk menyampaikan berbagai ide. Dalam setiap interaksi komunikasi, pesan menjadi unsur kunci yang harus disampaikan melalui media yang tepat, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, menggunakan kata-kata yang sederhana dan sesuai, serta memiliki tujuan yang jelas agar mudah dipahami oleh penerima pesan. Pesan merupakan sinyal atau gabungan sinyal yang

bertindak sebagai pemicu bagi penerima untuk meresponsnya. Pesan bisa berupa tanda atau simbol, dimana sebagian dari tanda tersebut dapat dipahami secara universal oleh sebagian besar manusia diseluruh dunia (Rangkuti, 2021). Pesan secara keseluruhan adalah apa yang dikomunikasikan oleh pengirim. Menurut Onong Effendy, pesan adalah gabungan dari pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan kepada orang lain menggunakan lambang, bahasa, atau simbol-simbol lainnya dalam proses komunikasi.

Manusia membangun komunikasi melalui pesan (Liliweri, 2017: 126). Pesan meliputi semua informasi yang dikirim oleh komunikator. Pesan memiliki inti yang menjadi panduan dalam upaya mengubah sikap dan perilaku komunikan. Pesan dapat dilihat dari segi substansi atau isinya. Widjaya, A.W (2000:32) membagi pesan dalam tiga antara lain informatif, persuasif, dan koersif.

1. Informatif

Jenis pertama dari bentuk pesan ini adalah yang bersifat informatif. Pesan ini mencakup informasi berupa fakta dan data, dengan komunikan yang kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Terkadang, dalam situasi tertentu, pesan informatif dapat lebih efektif daripada pesan persuasif.

2. Persuasif

Pada bentuk persuasif, pesan berisi ajakan untuk menggugah pemahaman dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan dapat menginspirasi perubahan sikap. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya kehendak secara sukarela. Perubahan semacam ini bukanlah hasil pemaksaan, melainkan diterima dengan keterbukaan oleh penerima pesan.

3. Koersif

Koersif adalah jenis pesan yang bersifat memaksa, dimana tidak mematuhi akan mengakibatkan sanksi-sanksi tertentu. Salah satu bentuk yang umum dari penyampaian pesan koersif adalah agitasi yang menekankan dan menimbulkan tekanan psikologis di kalangan publik. Koersif bisa berupa perintah, instruksi, dan sejenisnya.

Pada hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwasannya bentuk pesan komunikasi yang digunakan oleh keluarga pegawai

beacukai dalam membangun budaya antikorupsi yaitu bentuk pesan informatif dan persuasif. Pasangan suami istri ketika berkomunikasi membahas mengenai korupsi seringkali memberikan informasi seputar bahayanya korupsi, memberitahu informasi terkini mengenai pejabat negara atau aparatur sipil negara yang terjerat kasus korupsi, dan memberitahu bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh negara dan juga agama. Selain itu, pasangan suami istri juga selalu berupaya untuk saling mengingatkan dan membujuk pasangannya agar jangan sampai terlibat dalam kasus korupsi, senantiasa selalu menerapkan pola hidup sederhana, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dimiliki, serta senantiasa mengajak pada perbuatan yang jujur pada saat menjalankan tugas, dengan tujuan agar kehidupan keluarga menjadi bahagia, tenang, dan berkah.

C. Hambatan Komunikasi Antarpribadi Dalam Membangun Budaya Antikorupsi pada Keluarga Pegawai Beacukai di Kota Medan

Komunikasi yang efektif memiliki peranan penting dalam dinamika keluarga. Namun, dalam kenyataannya, berbagai rintangan dan tantangan terhadap komunikasi yang efektif seringkali tidak dapat dihindari. Secara teknis, rintangan dapat dijelaskan sebagai segala hal yang memiliki potensi untuk mengubah pesan dan/atau menghalangi penerima pesan dalam menerima pesan tersebut. (Devito, J.A., 2016: 30). Joseph A. Devito menyebutkan ada empat jenis hambatan komunikasi antarpribadi yaitu:

1. *Physical Noise*

Physical noise adalah hambatan yang berada dari luar komunikator maupun komunikan. Hambatan tersebut menghalangi transmisi fisik dari sinyal atau pesan yang disampaikan. Contoh dari *physiycal noise* antara lain bunyi klakson mobil, tulisan tangan yang tidak terbaca, tata bahasa yang buruk, banyaknya informasi asing atau istilah-istilah yang belum diketahui.

2. *Physiological Noise*

Gangguan atau hambatan fisiologis ini adalah hambatan yang ada di dalam komunikator atau komunikan. Contohnya, komunikator ataupun komunikan memiliki gangguan penglihatan seperti rabun jauh

atau rabun dekat, gangguan pendengaran, hilang ingatan, artikulasi saat berbicara yang kurang jelas.

3. *Psychological Noise*

Hambatan psikologis juga merupakan hambatan berupa gangguan mental komunikator maupun komunikan. Kita cenderung mengalami hambatan psikologis ketika kita berbicara dengan seseorang yang berpikiran tertutup atau yang menolak mendengarkan segala sesuatu yang belum dia percayai.

4. *Semantic Noise*

Hambatan semantik terjadi ketika terdapat perbedaan dalam sistem makna antara komunikator dan komunikan. Meskipun kata-kata yang digunakan mungkin sesuai secara literal, namun mereka mungkin memiliki konotasi yang berbeda dalam konteks sosial, psikologis, atau waktu tertentu, sehingga penerima pesan memberikan interpretasi yang berbeda dari maksud yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Sederhananya adalah hambatan semantik ini terjadi apabila seseorang mengalami perbedaan persepsi dengan lawan bicaranya.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan yang menjadi hambatan pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan adalah *semantic noise*. Pasangan hidup yang bukan merupakan seorang aparatur sipil negara cenderung memiliki pengetahuan terkait korupsi yang lebih rendah, karena dunia kerjanya bukan di pemerintahan. Sementara pasangannya yang berkerja dikantor pemerintahan pada umumnya lebih sering dihadapkan dengan keadaan dimana korupsi itu diketahui dan dipahami dengan baik oleh keadaan, adanya himbauan dari pimpinan, adanya informasi terkini, ataupun mendapatkan berita-berita lainnya yang berhubungan dengan korupsi, sehingga banyak istilah-istilah dalam korupsi yang belum diketahui oleh pasangannya yang tidak berkerja di pemerintahan. Oleh karena itu, perbedaan persepsi inilah yang menjadi hambatan dalam komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pola komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan adalah pola komunikasi kesetaraan (equality pattern). Hal tersebut dikarenakan semua informan sepakat mengatakan bahwasannya pada saat berkomunikasi dengan pasangan hidupnya, tidak ada perbedaan diantara mereka ataupun yang mendominasi, apalagi memonopoli pada saat komunikasi diantara mereka sedang berlangsung. Informan dan pasangannya memiliki kebebasan berpendapat dan berargumen. Suami istri memiliki kesetaraan dalam mengutarakan pendapat dan juga setara dalam hal pengetahuan yang dimiliki. Komunikasi yang dilakukan berjalan secara seimbang, sama, dan merata.

Bentuk pesan komunikasi yang digunakan oleh keluarga pegawai beacukai di Kota Medan dalam membangun budaya antikorupsi adalah bentuk pesan informatif dan persuasif. Pasangan suami istri ketika berkomunikasi membahas mengenai korupsi seringkali memberikan informasi seputar bahayanya korupsi, memberitahu informasi terkini mengenai pejabat negara atau aparatur sipil negara yang terjerat kasus korupsi, dan memberitahu bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh negara dan juga agama. Selain itu, pasangan suami istri juga selalu berupaya untuk saling mengingatkan dan membujuk pasangannya agar jangan sampai terlibat dalam kasus korupsi, senantiasa selalu menerapkan pola hidup sederhana, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dimiliki, serta senantiasa mengajak pada perbuatan yang jujur pada saat menjalankan tugas, dengan tujuan agar kehidupan keluarga menjadi bahagia, tenang, dan berkah.

Hambatan komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan adalah *semantic noise*. Pasangan hidup yang bukan merupakan seorang aparatur sipil negara cenderung memiliki pengetahuan terkait korupsi yang lebih rendah, karena dunia kerjanya bukan di pemerintahan. Sementara pasangannya yang berkerja dikantor pemerintahan pada umumnya lebih sering dihadapkan dengan keadaan dimana korupsi itu diketahui dan dipahami dengan baik oleh keadaan, adanya himbauan dari

pimpinan, adanya informasi terkini, ataupun mendapatkan berita-berita lainnya yang berhubungan dengan korupsi, sehingga banyak istilah-istilah dalam korupsi yang belum diketahui oleh pasangannya yang tidak berkerja di pemerintahan. Oleh karena itu, perbedaan persepsi inilah yang menjadi hambatan dalam komunikasi antarpribadi dalam membangun budaya antikorupsi pada keluarga pegawai beacukai di Kota Medan.

B. Saran

Diharapkan penelitian-penelitian tentang komunikasi keluarga yang berkaitan dengan membangun budaya antikorupsi lebih banyak dilakukan agar negara Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi sehingga cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045 bisa segera terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

- Aldi, N. (2023). *Survei KPK: Integritas Pemkot Medan Paling Rendah se-Indonesia*. Detik.Com.
[https://www.detik.com/sumut/berita/d-6600552/survei-kpk-integritas-pemkot-medan-paling-rendah-se-indonesia#:~:text=Survei KPK%3AIntegritas Pemkot Medan Paling Rendah se-Indonesia,-Nizar Aldi - detikSumut&text=Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\) dirilis,di](https://www.detik.com/sumut/berita/d-6600552/survei-kpk-integritas-pemkot-medan-paling-rendah-se-indonesia#:~:text=Survei%3AIntegritas Pemkot Medan Paling Rendah se-Indonesia,-Nizar Aldi - detikSumut&text=Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirilis,di)
- DeVito, J. A. (2016). *The Interpersonal Communication Book (14th Edition)*. Boston: Pearson Education.
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2019). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32-44.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hidayati, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Keluarga Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal KELUARGA*, 7(1), 59-70.
- Jamna, S. A. (2023). *5 Kota Terbesar di Indonesia, Nomor 1 Jumlah Penduduk Sangat Padat*. Okezone.
<https://economy.okezone.com/read/2023/06/26/470/2837034/5-kota-terbesar-di-indonesia-nomor-1-jumlah-penduduk-sangat-padat>
- KPK. (2022). *Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220517-understanding-9-integrity-values-to-prevent-corruption>
- Ni'am, S., & Santosa, B. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>
- Nugroho, R. A. (2023a). *Eks PNS DJBC Andhi Pramono Diduga Terima Gratifikasi Rp57 M*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231116154025-4-489615/eks-pns-djbc-andhi-pramono-diduga-terima-gratifikasi-rp57-m>
- Rahayu, N. K. D., Endiana, I. D. M., & Arizona, I. P. E. (2021). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang/Jasa dengan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali). *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 1864-1871.
- Rangkuti, A. T. (2021). Pola Komunikasi Antarpribadi Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa Bermasalah. *PERSEPSI: Communication Journal*, 4(1), 43-59.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*. Bandung: Alfabeta.
- Syakim, H. (2023). *Bukan Hanya Bupati Kapuas dan Istri, 7 Sejoli yang Tersandung Kasus Korupsi*. Apahabar.Com.
<https://apahabar.com/post/bukan-hanya-bupati-kapuas-dan-istri-7-sejoli-yang-tersandung-kasus-korupsi-lftepgng>

Thoyibah, Z. (2021). *Komunikasi dalam Keluarga: Pola dan Kaitannya dengan Kenakalan Remaja*. Jakarta: NEM.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.